

20. RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA
BLITAR TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar adalah dokumen perencanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan secara langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan cara mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang berjalan simultan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Proses penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan dimulai dengan persiapan penyusunan Renja dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Renja tahun lalu berdasarkan RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar, adalah sebagai berikut :

- a. Berpedoman pada RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Tahun 2024.
- b. Rumusan program/ kegiatan di dalam RENJA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/ pilihan pemerintah daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar
- c. Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung dalam pencapaian Visi dan Misi Daerah.
- d. Tahun 2024 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021. Tema Pembangunan Kota Blitar Tahun 2024 adalah “Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat melalui Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berkualitas serta Tata Ruang yang Berkelanjutan serta Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan”, dengan penekanan pada peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang tidak hanya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun juga untuk pemerataan

- e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$; dan

B. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Renja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6841);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender;
20. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
27. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Nomor 41 Tahun 2023 Seri E);
 28. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
 29. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7); dan
 30. Peraturan Walikota Blitar Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 71);
 31. Peraturan Walikota Blitar Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor XX);

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan tahun 2024 yang menjadi penjabaran RPJMD dan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2021–2026 serta disusun mengacu pada RKPD Kota Blitar Tahun 2024. Adapun tujuan di susunnya Renja ini adalah :

- a) Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2024
- b) Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2024
- c) Sebagai pedoman penyusunan KUAPPAS Tahun 2024 dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar Tahun 2024.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2024 disusun dengan mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, yang terdiri dari :

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, proses penyusunannya, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Perubahan Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan KUPAPPAS dan RPAPBD Tahun 2024

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan

lainnya yang dijadikan acuan dalam penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Maksud penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahun 2024 yang menjadi penjabaran RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026 serta disusun mengacu pada RKPD Tahun 2024. Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah sebagai pedoman penyusunan KUAPPAS Tahun 2024 dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen sesuai sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat

Daerah Bab ini memuat Tabel Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023. Tambahkan narasi hasil analisa terkait tingkat pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini memuat Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2021 2024 berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam IKU, IKK, SPM. Tambahkan narasi hasil analisa terkait kinerja pelayanan Perangkat Daerah.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat daerah

Bab ini memuat isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan hasil analisa terhadap Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023, Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2024, serta isu-isu penting skala nasional, regional maupun lingkup kota.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Bab ini memuat tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024. Untuk kolom rancangan awal RKPD diisi sesuai Tabel 6.2 Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026.

2.5 Penelaahan Usulan Program, kegiatan, dan sub kegiatan Masyarakat

Bab ini memuat Tabel Usulan Program, kegiatan, dan sub kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024. Usulan bersumber dari Musrenbang RKPD maupun bersumber dari Pokok-pokok Pikiran DPRD.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Bab ini memuat telaahan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang dapat diambil dari

Renstra/Renja K/L serta PMDN Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Bab ini memuat perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sesuai Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Berisikan Uraian penutup, berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan; dan
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama perangkat daerah dan tanda tangan kepala perangkat daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Guna memastikan kesinambungan serta kesesuaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra. Tujuan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra perangkat daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Pada bab ini disajikan review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Disperindag kota Blitar tahun lalu (2023) dan prakiraan capaian tahun berjalan (2023) dengan mengacu pada APBD tahun 2024. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun – tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah. Adapun program Disperindag Kota Blitar yang dilaksanakan pada tahun 2022 (n-2) adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan ;
3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting ;
4. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen ;
5. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.

Sedangkan program yang dilaksanakan pada tahun 2023 (n - 1) adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan ;
3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting ;
4. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen ;
5. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.

Rekapitulasi hasil evaluasi hasil pelaksanaan renja dan pencapaian renstra dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2022 Kota Blitar (Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Semester II tahun 2023)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program , Kegiatan dan Sub kegiatanTahun 2022			Target Program,Kegi atan,dan sub kegiatan tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2023	
						Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.06	Urusan Perdagangan										
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82			80	83,40	104,25	80,5	83,40	101,71
	Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100	%		100	100	100	100	100	100,00
	Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	50	dokumen		10	10	100%	10	20	40,00
	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	40	dokumen		8	8	100 %	8	16	40,00
	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi	100	%		100	100	100%	100	100	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program , Kegiatan dan Sub kegiatanTahun 2022			Target Program,Kegiatan,dan sub kegiatan tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2023	
						Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		keuangan perangkat daerah sesuai standar									
	Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	60	pegawai		58	58	100	58	58	96,67
	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah jenis Laporan Keuangan yang tersusun (Bulanan/Semesteran)	20	dokumen		4	4	100	4	8	40,00
	Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100	%		100	100	100	100	100	100,00
	Sub Keg. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah publikasi program/kegiatan perangkat daerah	50	publikasi		10			10		
		Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	15	even		3	3	100	3	6	40
		Jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi tentang ketentuan Cukai	760	orang					150		
	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100	%		100	100	100	100	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program , Kegiatan dan Sub kegiatanTahun 2022			Target Program,Kegi atan,dan sub kegiatan tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2023	
						Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Sub Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	55	komponen		11	11	100	11	22	40
	Sub Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	17	macam		3	3	100	3	6	35,29
		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	16	macam		2	2	100	3	4	25,00
	Sub Keg. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	155	macam		31	31	100	31	62	40,00
	Sub Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia	3.500	dos		700	700	100	700	1.400	40,00
		Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	125	macam		25	25	100	25	50	40,00
		Jumlah porsi makanan minuman yang tersedia	1.750	porsi		350	350	100	350	700	40,00
	Sub Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	35	cetakan		7	7	100	7	14	40,00
		Jumlah lembar penggandaan	75.000	lembar		15000	15000	100	15.000	30.000	40,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program , Kegiatan dan Sub kegiatanTahun 2022			Target Program,Kegi atan,dan sub kegiatan tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2023	
						Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Sub Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	180	bahan bacaan		36	36	100	36	72	40,00
	Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	250	rakor		50	50	100	50	100	40,00
	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	500	%		100	100	100	100	100	20,00
	Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan	600	rekening		132	132	100	132	264	44,00
	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100	%		100	100	100	100	100	100,00
	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	15	unit		3	3	100	3	6	40,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program , Kegiatan dan Sub kegiatanTahun 2022			Target Program,Kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2023	
						Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dan dibayarkan Perizinannya	80	unit		16	16	100	16	32	40,00
	Sub Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	4	macam		4	4	100	4	8	200,00
	Sub Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	5	unit		1	1	100	1	2	40,00
	Sub Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan Gedung kantor yang terpelihara	22	macam		4	4	100	5	9	40,91
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana perdagangan dalam kondisi baik	75			68	50	72,46	70,5	70,5	94,00
		Persentase usaha yang memperoleh fasilitasi pengembangan kapasitas	6	%					5		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program , Kegiatan dan Sub kegiatanTahun 2022			Target Program,Kegi atan,dan sub kegiatan tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2023	
						Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Keg. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pesentase Bangunan Pasar Rakyat dalam Kondisi Baik	90	%		70	54,54	77,91	70	70	77,78
	Sub Keg. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Bangunan Pasar yang Direvitalisasi	21	unit		4	4	100	4	8	38,10
		Jumlah Tenaga keamanan pasar yang tersedia	50	orang		50	50	100	50	50	100,00
		Jumlah Tenaga Kebersihan pasar yang tersedia	30	orang		30	30	100	30	30	100,00
		jumlah pedagang pasar rakyat yang dibina	2.500	pedagang		500	500	100	500	1.000	40,00
	Keg.Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Jumlah Usaha Perdagangan yang dibina	3.175	pedagang		500	200	38,09	550	750	23,62
	Sub Keg. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah usaha perdagangan yang mengikuti sosialisasi dan pelatihan	2.900			500	500	100	600	1.100	37,93
		Jumlah pedagang yang mendapatkan fasilitasi promosi perdagangan	135			25	10	40	25	35	25,93

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program , Kegiatan dan Sub kegiatanTahun 2022			Target Program,Kegi atan,dan sub kegiatan tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2023	
						Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah usaha perdagangan yang didata	3.000	unit usaha		2200	2257	102	2.500	4.757	158,57
	Sub Keg. Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pedagang kaki lima yang dibina	2.800	pedagang		500	385	77	500	1.000	35,71
		Jumlah PKL yang didata	1.830	pedagang		1.820	785	43,13	1.870	785	43,13
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase hasil monitoring harga bahan pokok dan barang penting yang dilaporkan dan dipublikasikan	100	%		100	100	100	100	100	100,00
	Keg. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi Perdagangan	60	laporan		12	12	100	12	24	40,00
	Sub Keg. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Publikasi Informasi harga dan bahan pokok	3.600	publikasi		700	700	100	720	1.420	39,44

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program , Kegiatan dan Sub kegiatanTahun 2022			Target Program,Kegi atan,dan sub kegiatan tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2023	
						Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah peserta pembinaan pencegahan peredaran minol	1.360	orang		210	210	100	250	460	33,82
		Jumlah laporan monev/ operasi pengawasan peredaran minuman beralkohol (minol)	10	laporan		2	2	100	2	4	40,00
	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat UTTP bertanda tera sah	55	%		35	56,2	160,57	40	56,2	102,18
	Keg. Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah alat UTTP yang bertanda tera sah	6.000	Alat UTTP		5500	4431	80,56	5.700	5700	95,00
	Sub Keg. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat UTTP yang ditera/tera ulang	6.000	Alat UTTP		5500	4431	80,56	5.700	5.700	95,00
	Sub Keg. Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah peserta sosialisasi BDKT dan Metrologi	1.550	orang		300	940	113	350	1.290	83,23
		Jumlah alat UTTP yang didata	8.000	Alat UTTP		7000	7874	112	7.000	7874	98,43
		Jumlah UTTP dan BDKT yang diawasi	3.750	unit		750	217	28,93	750	967	25,79

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program , Kegiatan dan Sub kegiatanTahun 2022			Target Program,Kegi atan,dan sub kegiatan tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2023	
						Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase peningkatan IKM	6	%		2	2,07	103,50	2,5	2,07	34,50
	Keg. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota	Jumlah IKM yang mendapatkan pembinaan	1.005	unit usaha industri		155	155	100	175	330	32,84
	Sub Keg. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Industri Kecil yang dilatih	975	unit usaha industri		125	125	100	175	300	30,77
		Jumlah monev pelatihan yang dilaksanakan	5	laporan		1	1	100	1	2	40,00
		Unit Usaha yang mendapatkan Fasilitasi HAKI	115	laporan		1	1	100	20	21	18,26
		Unit Usaha yang mendapatkan Fasilitasi PIRT	65	unit usaha industri		10	10	100	10	20	30,77
	Sub Keg. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran	Jumlah peningkatan industri kecil	156	unit usaha industri		11	11	100	25	36	23,08

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program , Kegiatan dan Sub kegiatanTahun 2022			Target Program,Kegi atan,dan sub kegiatan tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2023	
						Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Serta Masyarakat										
		Jumlah unit usaha yang terfasilitasi mengikuti pameran produk industri daerah	80	unit		80	80	100	80	80	100,00
		Jumlah pengunjung pameran yang menyatakan berminat untuk bekerjasama	62	orsng		11	11	100	12	23	37,10

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun 2022 dapat dikatakan berhasil, karena berkaitan dengan ekonomi yang sudah mulai membaik dan mulai beranjak naik walaupun masih dalam masa pemulihan karena terdampak oleh adanya pandemi Covid-19, sehingga dalam pelaksanaannya dimasa mendatang masih perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik. Hal tersebut dapat dijelaskan secara lebih rinci dalam tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar

No.	Indikator	SPM	IKU/IK K	Target Renstra SKPD pada Tahun				Realisasi Capaian		Proyeksi capaian pada tahun		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		9	10	11
1	Persentase Peningkatan Volume Usaha Perdagangan		IKU	1,75 %	2	2,25	2,5	1,85	2	2,24%	2,25 %	Sudah mulai membaik walaupun masih dalam masa pemulihan karena covid 19
2	Persentase Peningkatan produktivitas Industri		IKU	0,75 %	1	1,5	2	0,83	1	1,5%	2 %	
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		IKU	A (80)	A(81)	A(81,5)	A(82)	A(84)	A(81)	A(81,5)	A(82)	
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (IUPP/IUTS/SIUP toko swalayan)		IKK	15	15,5	16	16,5	5,27	15,5	16	16,5	

[illegible]

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PD

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Untuk itu, dalam proses penyusunannya perlu memperhatikan isu-isu tugas dan fungsi yang berkembang, antara lain:

1. Peningkatan Pengembangan infrastruktur sarana dan prasarana pasar rakyat sesuai standart pelayanan
2. Peningkatan mutu dan daya saing IKM Kota Blitar

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode 1 tahun, yang memuat daftar Program dan Kegiatan seluruh PD dengan prediksi PAGU Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN. RKPD disusun untuk menjabarkan RPJMD, menjadi pedoman penyusunan RENJA SKPD serta menjadi acuan proses Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA).

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Blitar Tahun 2024 disajikan secara lengkap pada tabel 2.3 Dokumen RENJA ini.

Dari review terhadap rancangan awal RKPD, ada beberapa perubahan pada pagu indikatifnya. Hal ini dikarenakan penyesuaian pagu yang ada dan skala prioritas kegiatan.

Tabel 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
KOTA BLITAR

SKPD : DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BLITAR

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				11.981.147.183					13.026.514.383	Adanya koreksi identifikasi ulang kebutuhan perangkat Daerah Penyesuaian pagu anggaran pemenuhan anggaran untuk pemenuhan sarpras/gedung perdagangan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Blitar	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	7.051.421.045	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Blitar	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	7.100.687.445	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	9.734.300	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	9.734.300	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah	10 dokumen	3.003.600	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah	10 dokumen	3.003.600	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar	Jumlah jenis dokumen pelaporan perangkat daerah yang tersusun	8 laporan	6.730.700	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	8 dokumen	6.730.700	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	5.721.389.340	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	5.721.389.340	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	57 pegawai	5.716.031.240	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 orang/bulan	5.716.031.240	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Blitar	Jumlah jenis Laporan Keuangan yang tersusun (Bulanan/ Semesteran)	12 laporan	5.358.100	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 laporan	5.358.100	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	156.841.920	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	176.239.220	
	Pengadaan Pakaian Dinas		Jumlah paket pakaian dinas	3 paket	56.492.700	Pengadaan Pakaian Dinas		Jumlah paket pakaian dinas	4 paket	76.950.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	beserta atribut kelengkapannya		beserta atribut kelengkapan			beserta atribut kelengkapannya		beserta atribut kelengkapan			
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	350 orang	100.349.220	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	350 orang	99.289.220	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	426.443.100	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	471.778.600	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar	Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	2 Paket	20.197.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	20.197.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar	Jumlah paket peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	5 paket	74.308.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	74.308.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	7.577.600	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	7.577.600	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	17 paket	73.987.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	73.987.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Kota Blitar	Jumlah dokumen bahan bacaan dan	36 dokumen	6.840.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	36 dokumen	6.840.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Perundang-undangan		peraturan Perundang-undangan yang disediakan			Perundang-undangan		Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	20 laporan	243.533.500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 laporan	243.519.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan sesuai Standar	100%	440.182.929	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan sesuai Standar	100%	440.657.529	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumberdaya Air dan Listrik yang disediakan	36 Laporan	205.864.929	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumberdaya Air dan Listrik yang disediakan	24 Laporan	205.864.929	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	234.318.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	24 Laporan	234.792.600	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Blitar	Persentase BMN yang terpelihara sesuai standar	100%	296.829.456	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Blitar	Persentase BMN yang terpelihara sesuai standar	100%	280.888.456	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	13 Unit	195.829.456	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	17 Unit	180.379.456	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6 unit	26.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 unit	25.509.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	75.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	75.000.000	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Kota Blitar	Persentase sarana perdagangan dalam kondisi baik	72%	4.546.308.800	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Kota Blitar	Persentase sarana perdagangan dalam kondisi baik	72%	5.549.449.600	
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Blitar	Persentase Bangunan Pasar Rakyat dalam Kondisi Baik	80 %	3.740.566.000	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Blitar	Persentase Bangunan Pasar Rakyat dalam Kondisi Baik	80 %	4.776.746.400	
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Blitar	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	2 unit	227.245.000	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Blitar	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	2 Unit	1.263.425.400	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Fasilitasi Pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Kota Blitar	Jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	2 unit	3.513.321.000	Fasilitasi Pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Kota Blitar	Jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	11 Unit	3.513.321.000	
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Kota Blitar	Persentase Usaha perdagangan yang memperoleh pembinaan	6 Persen	805.742.800	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Kota Blitar	Persentase Usaha perdagangan yang memperoleh pembinaan	6 %	772.703.200	
	Pembinaan dan Pengendalian Pembinaan dan Pengendalian Distribusi Perdagangan	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	5 Dokumen	527.298.500	Pembinaan dan Pengendalian Pembinaan dan Pengendalian Distribusi Perdagangan	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	5 Dokumen	494.258.900	
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	3 dokumen	278.444.300	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	4 Dokumen	278.444.300	
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Kota Blitar	Persentase hasil monitoring harga bahan pokok dan barang penting yang dilaporkan dan dipublikasikan	100 %	194.267.400	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Kota Blitar	Persentase hasil monitoring harga bahan pokok dan barang penting yang dilaporkan dan dipublikasikan	100%	194.267.400	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Blitar	Presentase barang penting yang diawasi	100%	92.438.600	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Blitar	Presentase barang penting yang diawasi	100%	92.438.600	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kota Blitar	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	2 laporan	92.438.600	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kota Blitar	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	2 laporan	92.438.600	
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Persentase pengendalian harga dan stok barang yang diawasi	100%	77.728.800	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Persentase pengendalian harga dan stok barang yang diawasi	100 %	77.728.800	
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 laporan	77.728.800	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 laporan	77.728.800	
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida		persentase pedagang pupuk dan pestisida	100 %	24.100.000	Pengawasan Pupuk dan Pestisida	Kota Blitar	persentase pedagang pupuk dan pestisida	100 %	24.100.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		bersubsidi yang diawasi			Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		bersubsidi yang diawasi			
	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	2 laporan	24.100.000	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kota Blitar	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	2 laporan	24.100.000	
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Kota Blitar	Persentase alat UTP bertanda tera sah	45%	189.149.938	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Kota Blitar	Persentase alat UTP bertanda tera sah	45%	182.109.938	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Kota Blitar	Jumlah alat UTP yang bertanda tera sah	5.800 unit	189.149.938	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Kota Blitar	Jumlah alat UTP yang bertanda tera sah	5.800 unit	182.109.938	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kota Blitar	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	5500 unit	86.467.038	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kota Blitar	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	5500 unit	86.467.038	
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Kota Blitar	Jumlah Pelaku usaha dibidang metrology legal yang dibina	200 orang	102.682.900	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Kota Blitar	Jumlah Pelaku usaha dibidang metrology legal yang dibina	160 orang	95.642.900	
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Kota Blitar	Persentase peningkatan IKM	3,5%	2.820.071.493	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Kota Blitar	Persentase peningkatan IKM	3,5%	2.820.071.493	
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan	Kota Blitar	Persentase IKM yang	5%	2.824.728.793	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan	Kota Blitar	Persentase IKM yang	5%	2.820.071.493	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Industri Kabupaten/Kota		memperoleh pembinaan			Industri Kabupaten/Kota		memperoleh pembinaan			
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	3 Dokumen	115.252.175	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	3 Dokumen	115.252.175	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	6 Dokumen	2.571.785.048	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5 Dokumen	2.567.127.748	
	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	4 Dokumen	137.691.570	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	3 Dokumen	137.691.570	
Jumlah				29.214.314.382						15.846.585.876	

2.4. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Perencanaan pembangunan yang baik tidak boleh bersifat *top down* saja, melainkan harus merupakan paduan yang selaras antara *top down* dan *bottom up*. Sejalan dengan amanat RPJMD Kota Blitar untuk melaksanakan pembangunan yang bersifat partisipatif, maka aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui berbagai media harus dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan OPD.

Dalam penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat diuraikan hasil kajian terhadap program / kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan maupun pelaksanaan musrenbang baik tingkat RT / RW, Kelurahan, Kecamatan maupun forum OPD

a. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat RT / RW

Musrenbang tingkat RT / RW merupakan penjaringan dan penggalian aspirasi masyarakat tingkat bawah (*grass roots*) yang dilaksanakan di tingkat RW. Dalam tahap ini dilakukan inventarisasi dan pembahasan berbagai bentuk usulan masyarakat untuk diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat dan bukan sekedar keinginan kelompok tertentu. Dengan musrenbang tingkat RT / RW ini diharapkan seluruh aspirasi warga masyarakat benar-benar dapat diakomodasikan dan disalurkan sehingga program-program yang akan direncanakan betul-betul berdasarkan kebutuhan seluruh masyarakat. Diharapkan pada tahap ini telah diperoleh usulan kegiatan pembangunan yang berkualitas yaitu benar-benar merefleksikan kebutuhan masyarakat serta memberikan dampak yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

b. Musrenbang Kelurahan

Musrenbang kelurahan adalah forum musyawarah tahunan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) kelurahan untuk menyepakati rencana kegiatan pembangunan pada tahun anggaran berikutnya.

Musrenbang kelurahan diharapkan menghasilkan formulasi usulan kebutuhan pembangunan yang terpadu yang di dalamnya tidak saja memvalidasi kebutuhan pembangunan hasil musrenbang tahun sebelumnya yang belum tertangani serta mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan pembangunan tahun yang akan datang dari masing-masing RT / RW di kelurahan yang bersangkutan, tetapi juga kebutuhan-kebutuhan lintas RW antar dua kelurahan yang berbeda yang diusulkan lebih lanjut ke musrenbang tingkat kecamatan.

c. Musrenbang Kecamatan

Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah pembangunan tahunan para pemangku kepentingan (stakeholders) di tingkat Kecamatan untuk menentukan prioritas dan memantapkan usulan kegiatan pembangunan masing-masing Kelurahan di Kecamatan yang bersangkutan sekaligus menyepakati rencana kegiatan lintas Kelurahan dan Kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja Kecamatan dan Rencana PD Kota pada tahun berikutnya.

Pada musrenbang Kecamatan, usulan dari Kelurahan diklasifikasikan dan didiskusikan sehingga akan didapatkan kegiatan prioritas pada tingkat kecamatan yang harus dilaksanakan pada tahun bersangkutan serta kegiatan lain yang masih bisa ditanggguhkan pelaksanaannya. Formulasi yang sudah terpilih secara rinci kemudian disampaikan secara formal dalam forum SKPD agar terjadi sinkronisasi program / kegiatan dengan SKPD terkait. Pada musrenbang Kecamatan peran SKPD melalui perwakilannya adalah memberikan arahan dan mendetailkan usulan dari hasil Musrenbang Kelurahan dalam rangka memantapkan usulan dari masing-masing Kelurahan.

d. Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD)

Forum SKPD (forum yang berhubungan dengan fungsi / sub fungsi, kegiatan / sektor dan lintas sektor) adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil musrenbang Kecamatan dengan PD sebagai upaya untuk mengisi Rencana Kerja PD yang tata penyelenggaraannya difasilitasi oleh PD terkait, sehingga dalam pelaksanaan forum PD diharuskan menghadirkan perwakilan dari masing-masing Kecamatan dengan membawa hasil Musrenbang Kecamatan.

PD. Namun demikian dalam hal salah satu dokumen tersebut belum tersedia, pelaksanaan forum PD dapat tetap dilakukan. Jumlah forum PD serta jadwal acara pelaksanaannya ditentukan dan dikoordinasikan BAPPEDA, disesuaikan dengan volume kegiatannya dan kondisi setempat. Dalam Forum PD diharapkan terjadi proses sinkronisasi usulan program / kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan dengan program / kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan dengan program / kegiatan

TABEL 2.4
USULAN PROGRAM & KEGIATAN DARI MASYARAKAT & PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024 KOTA
BLITAR

SKPD : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
	N I H I L				

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun keempat pelaksanaan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Tema pembangunan RKP 2024 adalah “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” yang dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional, yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan, dengan sasaran :
 - Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;
 - Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian;
 - Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT);
 - Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
 - Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan;
 - Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan;
 - Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi
 - Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;
 - Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) ; dan
 - Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan, dan Menjamin Pemerataan dengan sasaran :
 - Pembangunan Wilayah Sumatera;
 - Pembangunan Wilayah Jawa-Bali;
 - Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara;
 - Pembangunan Wilayah Kalimantan;
 - Pembangunan Wilayah Sulawesi;
 - Pembangunan Wilayah Maluku; dan
 - Pembangunan Wilayah Papua.
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan Berdaya saing, dengan sasaran :
 - Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan;
 - Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk;
 - Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan;
 - Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda;

- Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan;
 - Meningkatnya produktivitas dan daya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, dengan sasaran:
 - Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya;
 - Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan;
 - Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial;
 - Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat;
 - Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa; dan
 - Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif
 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, dengan sasaran :
 - Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar;
 - Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar;
 - Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan;
 - Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan; dan
 - Meningkatnya layanan infrastruktur TIK.
 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dengan sasaran :
 - Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
 - Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim; dan
 - Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap baseline.
 7. Memperkuat Stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik dengan sasaran :
 - Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi, dan Terjaganya Kesenjangan Warga Negara secara Optimal;
 - Optimalnya Kebijakan Luar Negeri;
 - Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap;
 - Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik; dan
 - Terjaganya Stabilitas Keamanan Nasional.

Berdasarkan arah kebijakan Nasional Tahun 2024, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan yaitu Memperkuat ketahanan ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan, dengan sasaran :

- Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;

- Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian;
- Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT);
- Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;
- Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) ; dan
- Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pencapaian arah kebijakan Nasional tahun 2024 adalah melakukan sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi perencanaan pembangunan Pusat dan Daerah yang dituangkan dalam dokumen Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah yang memuat rancangan kerangka ekonomi, rencana kerja dan pendanaan, baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi OPD untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu.

Adapun penetapan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar di tahun 2024 sebagaimana dalam *Tabel 3.1* di bawah ini.

Tabel 3.1

Tabel Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Tahun 2024

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET 2024	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024
1	2	3	5	6	7	8
1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan perindustrian	Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB	24,80%	Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Persentase peningkatan volume usaha perdagangan	2,25 %

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET 2024	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024
1	2	3	5	6	7	8
	Meningkatnya tata kelola perangkat Daerah	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	9,83 %	Meningkatnya produktivitas Industri	Persentase peningkatan produktivitas Industri	1,5 %
		Nilai Sakip perangkat daerah	A (81,5)	Menigkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip perangkat daerah	A (81,5)

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Faktor utama yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Pencapaian Visi dan Misi Walikota Blitar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar telah menetapkan tujuan dan sasaran yang tertuang di dalam RENSTRA Dinas tahun 2021-2026 dan sudah dibahas di Bab sebelumnya. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dibutuhkan strategi – strategi antara lain, yaitu :

1. Peningkatan volume perdagangan besar dan eceran, dengan kebijakan :
 - Optimalisasi peningkatan sarana dan prasarana dan pengembangan kapasitas
 - Optimalisasi pengawasan perdagangan
2. Peningkatan nilai produksi industri kecil dan menengah (IKM), dengan kebijakan :
 - Peningkatan kapasitas SDM pelaku IKM
 - Peningkatan pemasaran hasil industri
 - Peningkatan nilai produksi IKM sebagai barang ekspor

Dari strategi dan kebijakan yang ada, maka disusunlah program dan kegiatan dan sub kegiatan yang dapat mendukung langsung pencapaian sasaran dan tujuan dinas, dimana dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Jumlah program yang diusulkan untuk dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2024 adalah yaitu ada 5 Program dengan 13 Kegiatan dan 30 Sub Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan :
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya
 - b. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor
 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- II. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, dengan Kegiatan :
1. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, dengan Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - b. Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
 2. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya, dengan Sub Kegiatan :
 - a. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
 - b. Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
- III. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, dengan Kegiatan :
1. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
 2. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :
 - a. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
 3. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan :
 - a. Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi

IV. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, dengan Kegiatan :

1. Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan, dengan Sub Kegiatan :
 - a. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
 - b. Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal

V. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, dengan Kegiatan :

1. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota, dengan Sub Kegiatan :
 - a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
 - b. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
 - c. Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri

Tabel 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2024
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025 KOTA BLITAR

Nama PD : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.	.			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3	30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				13.026.514.383				15.621.770.148
3	30	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kota Blitar	81	7.100.687.445			84	7.921.586.795
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Kota Blitar	100 %	9..734.300	Dana Transfer Umum-DAU		100 %	10.773.871
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah	Kota Blitar	10 dokumen	3.003.600	Dana Transfer Umum-DAU		10 dokumen	3.325.051
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar	8 dokumen	6.730.700	Dana Transfer Umum-DAU		8 dokumen	7.448.820
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Kota Blitar	100 %	5.721.389.340	Dana Transfer Umum-DAU		100 %	6.293.542.924

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar	57 orang	5.716.031.240	Dana Transfer Umum-DAU	57 pegawai	6.287.634.364
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKP	Kota Blitar	12 laporan	5..358.100	Dana Transfer Umum-DAU	12 laporan	5..908.560
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Kota Blitar	100 %	176.239.220	Dana Transfer Umum-DAU	100 %	216.904.500
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Kota Blitar	4 paket	76.950.000		4 paket	95.325.500
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	Kota Blitar	350 orang	99.289.220	DBHCHT	350 orang	121.579.000
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Kota Blitar	100 %	471.778.600	Dana Transfer Umum-DAU	100 %	549.563.000
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Blitar	1 Paket	20.197.000	Dana Transfer Umum-DAU	1 paket	25.415.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Blitar	4 paket	74.308.000	Dana Transfer Umum-DAU	4 paket	84.544.000
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Blitar	1 Paket	7.577.600	Dana Transfer Umum-DAU	1 paket	8.644.000
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Blitar	15 Paket	73.987.000	Dana Transfer Umum-DAU	15 paket	84.040.000
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Blitar	4 Paket	45.350.000	Dana Transfer Umum-DAU	4 paket	55.720.000
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kota Blitar	36 dokumen	6.840.000	Dana Transfer Umum-DAU	36 dokumen	7.400.000
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar	15 laporan	243.519.000	Dana Transfer Umum-DAU	15 laporan	283.800.000
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Kota Blitar	100 %	440.657.529	Dana Transfer Umum-DAU	100 %	483.455.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Blitar	24 laporan	205.864.929	Dana Transfer Umum-DAU	24 laporan	220.405.000
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Blitar	24 laporan	234.792.600		24 laporan	263.050.000
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	Kota Blitar	100 %	280.888.456	Dana Transfer Umum-DAU	100 %	367.347.500
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Blitar	17 unit	180.379.456	Dana Transfer Umum-DAU	17 unit	206.151.800
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Blitar	10 unit	25.509.000	Dana Transfer Umum-DAU	10 unit	36.195.700
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Blitar	1 unit	75.000.000	Dana Transfer Umum-DAU	1 unit	125.000.000
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana perdagangan dalam kondisi baik	Kota Blitar	72%	5.549.449.600	Dana Transfer Umum-DAU	%	7.221.976.604

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pesentase Bangunan Pasar Rakyat dalam Kondisi Baik	Kota Blitar	80 %	4.776.746.400	Dana Transfer Umum- DAU	%	5.891.716.604
				Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan	Kota Blitar	2 unit	1.263.425.400	Dana Transfer Umum- DAU	2 unit	2.256.000.000
				Fasilitasi Pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Kota Blitar	11 unit	3.513.321.000		11 unit	3.635.716.604
				Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase usaha perdagangan yang memperoleh pembinaan	Kota Blitar	6 %	772.703.200	Dana Transfer Umum- DAU	%	1.330.260.000
				Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Blitar	5 Dokumen	494.258.900	Dana Transfer Umum- DAU	5 dokumen	950.260.000
				Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Blitar	4 Dokumen	278.444.300	Dana Transfer Umum- DAU	4 dokumen	380.000.000
				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase hasil monitoring harga bahan pokok dan barang penting yang dilaporkan dan dipublikasikan	Kota Blitar	100 %	194.267.400	Dana Transfer Umum- DAU	100 %	253.386.749
				Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketersediaan barang penting yang diawasi	Kota Blitar	100%	92.438.600		100%	112.446.749

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kota Blitar	2 laporan	92.438.600		2 laporan	112.446.749
				Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	persentase pengendalian harga dan stok barang yg diawasi	Kota Blitar	100%	77.728.800	Dana Transfer Umum-DAU	100 %	98.738.000
				Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kota Blitar	4 laporan	77.728.800	Dana Transfer Umum-DAU	4 laporan	98.738.000
				Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase pedagang pupuk dan pestisida bersubsidi yang diawasi	Kota Blitar	100 %	24.100.000		100 %	42.200.000
				Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kota Blitar	2 laporan	24.100.000		2 laporan	42.200.000
				PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat UTP bertanda tera sah	Kota Blitar	45 %	182.109.938	Dana Transfer Umum-DAU	%	224.820.000
				Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah alat UTP yang bertanda tera sah	Kota Blitar	5.800 Unit	86.467.038	Dana Transfer Umum-DAU	5.500 Unit	224.820.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Kota Blitar	5500 unit	86.467.038	Dana Transfer Umum-DAU	5500 unit	89.000.000
				Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Kota Blitar	160 orang	95.642.900	Dana Transfer Umum-DAU	160 orang	135.820.000
				URUSAN PERINDUSTRIAN			2.820.071.493				4.030.352.000
				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase peningkatan IKM	Kota Blitar	3,5 %	2.820.071.493	Dana Transfer Umum-DAU	%	4.030.352.000
				Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	persentase IKM yang memperoleh pembinaan	Kota Blitar	5 %	2.820.071.493	Dana Transfer Umum-DAU	%	4.030.352.000
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kota Blitar	3 Dokumen	115.252.175	Dana Transfer Umum-DAU	3dokumen	218.652.000
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kota Blitar	5 dokumen	2.567.127.748	Dana Transfer Umum-DAU	5 dokumen	3.654.500.000
				Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kota Blitar	3 dokumen	137.691.570		3 dokumen	157.200.000
TOTAL							15.846.585.876				19.652.122.148

Selain berpedoman pada prioritas daerah, penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2024 juga memfokuskan pada rencana tindak lanjut atas Langkah perbaikan sebagaimana tertuang dalam LKjIP Tahun 2022, sebagai berikut:

- a. Tahun 2023 akan dilaksanakan pembangunan pasar templek dan Pasar Hewan Terpadu Dimoro
- b. Dilaksanakan monev terhadap toko modern /waralaba dan dilaksanakan pembinaan terhadap toko modern/ waralaba
- c. Dilaksanakan monitoring pembinaan dan penataan PKL dengan melibatkan /koordinasi dengan OPD terkait
- d. Melakukan Kerjasama dengan lembaga keuangan /perbankan untuk modal usaha IKM/perkreditan
- e. Program DBHCHT bantuan sarana prasarana produksi
- f. Melakukan Pelatihan pemasaran dan sertifikasi produk
- g. Melakukan Pelatihan /seminar digital marketing

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian tahun 2024 yang berpedoman pada Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun (2021-2026) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2024. Rencana Kerja ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2022 dan 2023, sebagai pedoman bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan di dalam melaksanakan program dan kegiatan satu tahun kedepan, memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

1. Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian
 - a. Rumusan program/ kegiatan di dalam RENJA Dinas Perindustrian dan Perdagangan didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/ pilihan pemerintah daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
 - b. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun 2023 dan tahun 2024.
 - c. Penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD
2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan
 - a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024 serta diselaraskan dengan RKPD Kota Blitar tahun 2024;
 - b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024 dengan berpedoman kepada Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2024 ;
 - c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2024.
 - d. Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja tahun 2024 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.
3. Rencana Tindak Lanjut

Dalam menjalani tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar memerlukan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

- a. Dalam rangka sinergitas perencanaan untuk mewujudkan Indikator Kinerja Utama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja, koordinasi dengan perangkat daerah harus dilaksanakan lebih intensif, agar proses pembangunan yang dilaksanakan berdaya guna dan berhasil guna.
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat, dalam proses perencanaan, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
- c. Peningkatan kapasitas SDM aparatur dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Upaya peningkatan dapat dilakukan melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencanaan
- d. Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2024, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan beedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Akhirnya, sajian dokumen ini diharapkan dapat bermanfaat kepada siapapun juga atau setidaknya dapat mengetahui kedudukan tugas dan fungsi serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar. Memperhatikan percepatan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan mengingat rencana kerja dilakukan dengan kurun waktu satu tahun anggaran maka untuk mencapai tujuan sesuai dengan target masing-masing kegiatan perlu mengedepankan koordinasi dan sinkronisasi internal dan eksternal di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar.